

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan industri pertahanan Tiongkok terhadap posisi tawarnya dalam konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). Konflik LTS ini menjadi perhatian berbagai negara yang terlibat, dikarenakan kepentingan yang tumpang tindih, serta menjadi isu yang menarik dalam kajian keamanan dan politik internasional. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menarik untuk dielaborasi secara ilmiah dan mendalam tentang posisi Tiongkok di LTS, sebelum dan setelah berkembangnya industri pertahanan Tiongkok.

Sengketa di LTS sudah dimulai pertama kali sejak tahun 1947, di mana saat itu Tiongkok mengklaim secara sepihak sebagian besar wilayah di LTS dengan mengeluarkan peta yang menggambarkan sembilan garis putus-putus. Peta tersebut memasukan Wilayah Laut Tiongkok Selatan ke wilayah kedaulatan Tiongkok. Dalam klaimnya, Tiongkok menggunakan dasar sejarah dari kekaisaran Tiongkok yang dahulu memang menguasai perairan di wilayah LTS. Faktor sejarah menjadikan Tiongkok merasa memiliki hak atas klaim pengelolaan dan penguasaan di LTS. Klaim ini kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1953, ketika partai komunis berkuasa. Sedangkan Republik Tiongkok yang kalah dalam perang saudara pindah ke kepulauan Taiwan, yang juga mengajukan klaim yang sama (Wu 2016).

Klaim yang dibuat oleh Tiongkok ini pada akhirnya mengalami masalah yang tumpang tindih dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan klaim yang diajukan oleh Tiongkok bersinggungan langsung dengan wilayah perbatasan laut mereka. Negara yang juga memiliki kepentingan dalam klaim di LTS adalah Republik Tiongkok/Taiwan dan Vietnam. Di mana dua negara ini memiliki klaim yang sama dengan Tiongkok mengenai kepemilikan kepulauan *Paracel* dan *Scarborough Shoal* yang berada di bagian utara LTS. Sedangkan untuk kepulauan *Spratly* di bagian selatan diperebutkan antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Republik Tiongkok/Taiwan dan Malaysia. Sedangkan Brunei hanya mengklaim sebagian wilayah teritorial laut di LTS (Ward 2018).

Dalam klaimnya, Brunei Darussalam menyatakan bahwa beberapa wilayah laut yang diklaim dan bahkan sudah mulai diokupasi oleh negara sengketa lainnya merupakan pelanggaran terhadap hukum laut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam hukum laut diatur tentang hak dan kedaulatan negara untuk melakukan eksplorasi terhadap wilayah laut yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan *continental shelf*. Maksud dari *continental shelf* sendiri merupakan bagian dari dasar laut yang masih terhubung dengan daratan atau kelanjutan dari garis benua yang terdapat di laut, dengan jarak paling jauh adalah 200 mil dari garis dasar pantai. Pada artikel 55 dan 56 tentang ZEE dan artikel 76 dan 77 tentang *continental shelf* menyebutkan bahwa negara yang memiliki wilayah laut ini dihitung dari garis pantainya memiliki hak dan kedaulatan atas segala sumber daya yang dapat dieksplorasi dari wilayah laut ini, tetapi tidak untuk memilikinya

(A.Cossa 1998). Selain itu, Malaysia juga memiliki klaim yang berdasarkan hukum laut khususnya *continental Shelf* yang sama dengan Brunei Darusalam. Klaim Malaysia ini dilakukan pada tahun 1979 melalui publikasi peta resmi yang memperlihatkan wilayah laut yang berada dibagian selatan dan timur kepulauan *Spratly* yang di klaim oleh Tiongkok, Filipina, dan Vietnam seperti kepulauan karang *Swallo Reef* atau *Layang Atoll* (Leszek Buszynski 2007).

Selain menggunakan dasar hukum dari UNCLOS, Vietnam juga mengajukan klaim menggunakan dasar fakta sejarah. Klaim yang dilakukan oleh Vietnam terhadap sebagian besar wilayah LTS termasuk kepulauan *Spratly* dan *Paracel* juga menggunakan dasar sejarah dari adanya okupasi dan aneksasi Perancis pada tahun 1933 di wilayah tersebut (A.Cossa 1998). Kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945, menjadi alasan Vietnam untuk mengakui hasil aneksasi Perancis itu menjadi bagian dari Vietnam. Sedangkan Filipina dalam hal ini merupakan negara yang juga mengklaim hanya sebagian wilayah LTS khususnya kepulauan *Spratly* atau yang dinamakan oleh Filipina sebagai Kepulauan Kalayaan dan beberapa kepulauan di sebelah Barat Filipina seperti Scarborough Shoal (A.Cossa 1998). Banyaknya klaim tumpang tindih inipun menjadi dasar dari konflik yang terjadi di LTS.

Dalam menghadapi konflik, setiap negara di dunia tentu ingin memiliki angkatan bersenjata yang kuat untuk menjaga eksistensi dan kedaulatannya. Seiring dengan kebutuhan negara di dunia, peralatan perang pada akhirnya kian lama kian bermunculan dengan teknologi yang modern mulai dari senapan hingga peluru kendali, dan dari kapal laut hingga pesawat siluman. Semua itu ditujukan untuk

membuat sebuah negara memiliki daya saing yang kuat di bidang pertahanan. Hal tersebut dibutuhkan dalam politik internasional. Karena menurut pandangan kelompok realis, dalam politik internasional yang bersifat anarki tujuan dari politik tersebut ialah pencapaian kepentingan nasional dari negara-negara yang berdaulat dari aktor hubungan internasional (Weber 2005).

Dalam konflik yang terjadi, Tiongkok adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Dengan didukung industri militernya yang maju, Tiongkok menjadi negara yang memiliki kemampuan paling besar dibanding negara lain yang memosisikan dirinya dalam usaha penyelesaian sengketa tersebut. Hal tersebut tidak lain karena kekuatan militernya yang lebih unggul secara kualitas dan jumlah persenjataan dibandingkan negara-negara di kawasan tersebut (Litai 2016). Walau sudah melakukan klaim kepemilikan wilayah LTS sejak tahun 1947, Tiongkok tidak banyak melakukan pergerakan dalam mengukuhkan kekuasaannya di LTS. Hal ini dikarenakan pasca Perang Dunia Kedua berakhir, kekuatan negara-negara Barat masih berkepentingan besar di kawasan tersebut. Seperti konflik Perancis di Indocina, dan perang Vietnam yang berkecamuk antara Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang di dukung oleh Amerika Serikat.

Pada saat kekuatan negara-negara Barat masih bercokol di kawasan Asia Tenggara yang bersinggungan langsung dengan LTS, Tiongkok bersikap cukup hati-hati untuk tidak langsung terlibat konfrontasi dengan negara-negara Barat tersebut. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemampuan pertahanan Tiongkok saat itu. Dalam bidang militer, kebijakan militer Tiongkok di bawah Xi Jinping melanjutkan

kebijakan-kebijakan militer sebelumnya namun lebih menekankan pada peningkatan kekuatan militer oleh tiga angkatan bersenjata yang dimiliki RRT, yaitu angkatan udara yaitu *People's Liberation Army Air Force* (PLAAF), angkatan laut atau *People's Liberation Army Navy* (PLAN), serta angkatan daratnya *People's Liberation Army Ground Force* (PLAGF). Peningkatan angkatan bersenjata ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan nasional dan memenangkan peperangan apabila terjadi konflik bersenjata dengan negara lain.

Wilayah LTS ini begitu penting bagi Tiongkok karena pada dasarnya selain faktor sejarah, di LTS terdapat banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seperti minyak bumi. Namun pada dasarnya yang menjadi hal utama bukanlah sumber daya alamnya. Tiongkok memiliki kota-kota besar yang berada pada wilayah pesisir timur Tiongkok, kota besar ini yang menjadi pusat ekonomi, industri dan pemerintahan di Tiongkok seperti Beijing, Shanghai dan lain-lain. Oleh karena itu untuk melindungi wilayah pesisir yang terdiri dari sektor-sektor vital tersebut Tiongkok harus memiliki kemampuan pertahanan yang mumpuni untuk melindungi wilayah Tiongkok tersebut (McDevitt 2016).

Laut Tiongkok Selatan adalah arena awal dari upaya memperkuat kemampuan dan kekuatan pertahanan Tiongkok. Karena pada dasarnya negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki kekuatan militer yang sangat jauh secara jumlah dan kualitas alutsistanya jika dibandingkan dengan Tiongkok, berbeda dengan wilayah timur Tiongkok, di mana Tiongkok berhadapan dengan negara-negara yang memiliki

kekuatan pertahanan yang cukup maju seperti Jepang, dan memiliki perlindungan langsung dari negara besar seperti Amerika Serikat.

Jika dapat mengontrol wilayah LTS, Tiongkok tidak hanya akan mendapatkan sumber daya alam yang melimpah di LTS, namun juga dapat menguasai serta mengontrol jalur perniagaan penting dan yang paling penting adalah Tiongkok memiliki pengalaman pertama dalam penggunaan kemampuan tempur alutsista yang mereka buat sendiri. Hal ini akan sangat berguna untuk menghadapi kemungkinan konflik berikutnya dalam mempertahankan kedaulatan dan kestabilan negaranya yang bisa saja bersinggungan langsung dengan negara besar. Sebagai negara yang memiliki jumlah personil terbesar di dunia dengan jumlah personil hingga 2,5 juta personil aktif (Lockie 2016), militer Tiongkok memiliki pengalaman yang minim dibanding negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Serta kondisi geopolitik di Asia Timur yang akan bersinggungan dengan kepentingan Jepang, Korea Selatan dan tentu saja Amerika Serikat.

Dalam perjalanan perkembangan industri pertahanan Tiongkok tidak dapat dipungkiri, pasang surut ekonomi Tiongkok sangat terpengaruh oleh sistem pemerintahan yang dianut. Di awal terbentuknya RRT, industri pertahanan Tiongkok belum berkembang. Semua itu buah dari sistem ekonomi Tiongkok yang mengisolasi diri dari pergaulan dunia luar. Tiongkok hanya membuka diri kepada Uni Soviet yang memiliki ideologi komunis. Akibatnya, transformasi teknologi Tiongkok sangat tergantung pada Uni Soviet (Medeiros 2005).

Meskipun pada tahun 1970-an Tiongkok sudah memiliki sejumlah perusahaan pertahanan, Tiongkok hanya bisa mengharapkan kerja sama dan orderan dari Uni Soviet. Perusahaan itu di antaranya, *Chengdu Aircraft Industry Corp.*, *Changhe Aircraft Industry Corp.*, *Tiongkok Nanchang Aircraft Manufacturing Corp.*, dan *Shenyang Aircraft Corp.* Perusahaan yang memproduksi peralatan militer Tiongkok tersebut sebenarnya hanya berposisi sebagai perusahaan pemegang lisensi dari Uni Soviet untuk merakit pesawat tempur yang disain aslinya dibuat oleh Uni Soviet (Medeiros 2005).

Selain merakit pesawat tempur, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga mendapatkan lisensi untuk merakit rudal, misil, atau senapan buatan Uni Soviet. Bahkan, pada periode 1945-1970 Tiongkok banyak memesan peralatan militer dari Uni Soviet untuk kebutuhan angkatan bersenjata, khususnya angkatan udara. Tiongkok membeli pesawat tempur, pesawat latihan tempur, pesawat angkut dan senjata dalam jumlah besar. Kerja sama lisensi perakitan memberikan kontribusi besar bagi industri pertahanan Tiongkok. Kerja sama tersebut membuat Tiongkok secara langsung telah mengadopsi teknologi yang digunakan Uni Soviet. Kerja sama lisensi perakitan tersebut adalah jalan tercepat bagi Tiongkok untuk mengembangkan kemampuan industri pertahanannya. Tak hanya itu, Tiongkok berkesempatan menjual produk-produk alih teknologi itu ke negara lain.

Paska runtuhnya Uni Soviet, pada tahun 1992 hubungan perdagangan senjata kembali dimulai. Kerja sama ini dilanjutkan oleh salah satu negara pecahan Uni Soviet, yaitu Rusia. Rusia kembali mensuplai peralatan militer dan lisensi teknologi

kepada Tiongkok dengan menjual 24 pesawat tempur SU-27s. Ekspor pesawat tempur ke Tiongkok ini memberi keuntungan sebesar 1,2 milyar dollar, dimana suplai pesawat ke Tiongkok terus berlanjut dengan kesempatan Tiongkok membeli pesawat tempur SU-27s dalam lima tahun selanjutnya, serta lisensi produksi di bawah perusahaan Tiongkok sebanyak 50-200 pesawat tempur (Blank 1997).

Meski sudah melakukan klaim sejak 1947 dengan peta yang menyertakan sembilan garis putus-putus, namun Tiongkok baru mulai bersikap agresif dalam mengukuhkan klaimnya ketika sudah memiliki kekuatan militer yang kuat. Hal ini berkat industri pertahanannya, dengan kemampuan membangun peralatan tempur yang kuat. Industri pertahanan Tiongkok mampu mendongkrak tingkat kemampuan militer Tiongkok, dari yang awalnya hanya bersifat *Defensive*, hingga mampu melakukan kegiatan *Offensive*. Di sini penulis akan menganalisis sejarah perkembangan industri militer Tiongkok dan dampaknya bagi kekuatan tawar diplomasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

1.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian; bagaimana dampak perkembangan industri pertahanan terhadap posisi tawar Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

Mengetahui secara ilmiah dampak industri pertahanan terhadap posisi tawar Tiongkok di LTS.

1.4 Manfaat penelitian

Sebagai bahan referensi, informasi, masukan, rekomendasi bagi pemerhati keamanan internasional. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan referensi mengenai kebangkitan militer Tiongkok di kawasan bagi pengamat militer. Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris bagi para penstudi Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Artinya tidak boleh diisolasikan ke dalam variabel atau hipotesis (Prastowo 2011).

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2007).

Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini memiliki desain dalam proses pelaksanaannya. Diawali dengan mengidentifikasi dan memilih

masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah, melakukan kajian pustaka, membuat asumsi dan hipotesis, lalu menentukan pengumpulan data sekunder, melakukan analisis data, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Desain penelitian mengacu pada studi kasus sengketa di LTS, dengan menggunakan pengamatan, pemeriksaan, pengumpulan informasi yang sistematis dan mendalam untuk memperoleh pengamatan terhadap dampak perkembangan industri pertahanan Tiongkok terhadap daya tawar Tiongkok dalam konflik LTS.

1.3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif analisis dan historis analisis. Jenis deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematis dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab-akibat dan penyusunan data. Dalam jenis penelitian ini dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam hubungan internasional termasuk dalam hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini menggambarkan dan menganalisis dampak dari perkembangan industri Tiongkok terhadap kekuatan tawar Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Sedangkan historis analisis adalah penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan dengan kejadian masa lampau untuk

menguji kebenaran hipotesis yang berkaitan dengan sebab akibat atau kecendrungan kejadian-kejadian yang dapat membantu menggambarkan atau menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian dimasa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan apa saja yang sudah dan akan dilakukan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.3.2 Jenis data

Data dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono 2010). Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder yakni berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, situs internet, dan lain-lain, yang memuat tulisan-tulisan mengenai isu ini. Data sekunder kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri pertahanan Tiongkok dapat mempengaruhi kekuatan tawar-menawar di LTS.

1.3.3 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dari literatur. Literatur berkaitan dengan topik perkembangan industri pertahanan Tiongkok, dan konflik sengketa di LTS yang akan dibahas. Literatur dapat berupa buku, dokumen, jurnal, majalah, dan artikel.

1.3.4 Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data. Data diorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan teknik kualitatif. Pada prinsip pengolahan data akan dilakukan melalui 3 tahap. Tahap-tahap dalam pengolahan tersebut adalah menganalisa, reduksi, *display* dan verifikasi. Pengolahan dan pelaksanaan analisis data akan melalui tahap kegiatan. Tahap-tahap kegiatan seperti menganalisis, menyeleksi, dan merangkum data. Data dirangkum dalam bentuk deskripsi yang sistematis. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan. Dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya. Sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi secara menyeluruh dan mendapatkan gambaran terperinci, maka penulis telah membagi berdasarkan sistematika penelitian ke dalam dua bab. Pembagian bab-bab tersebut antara lain, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab Pertama penulis akan memaparkan mengenai latar belakang yang memuat alasan pemilihan judul "Dampak Perkembangan Industri Pertahanan Tiongkok Terhadap kekuatan tawar Tiongkok dalam sengketa LTS. Disusul dengan rumusan masalah tentang permasalahan yang diangkat. Kemudian dijelaskan tujuan, manfaat,

dan sistematika penelitian. Diharapkan bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Kedua akan menjelaskan landasan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan konsep *Revolution in Military Affairs* (RMA) dan konsep *Bargaining*, serta konsep *Military Diplomacy* untuk menjelaskan kasus yang ada. Kerangka pemikiran dan argumentasi utama mengenai penelitian yang dilakukan juga dijabarkan dalam bab ini.

BAB 3: PEMBAHASAN

Pada Bab ketiga akan menjelaskan bagian inti dalam penelitian, yang memaparkan penelitian yang dilakukan, argumen serta data-data yang digunakan untuk menjelaskan studi kasus dalam penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori atau konsep yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB 4: PENUTUP

Pada bagian bab terakhir, yaitu bagian penutup. Penulis memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan.